

TUGAS AKHIR

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA MAKASSAR

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



Diusulkan Oleh:

AYU ASTUTI.S NIM 015 04 023

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
POLITEKNIK BOSOWA
TAHUN 2018**

LEMBAR PENGESAHAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA MAKASSAR

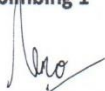
Oleh:

AYU ASTUTI.S / 015 04 023

Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu syarat kelulusan Program Diploma III Politeknik Bosowa

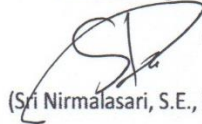
Menyetujui,

Pembimbing 1

 8/8/2018

(Veronika Sari Den Ka, S.ST)

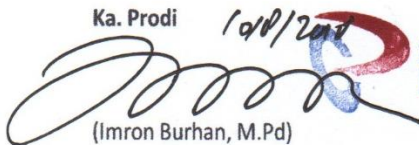
Pembimbing 2

 19/8/2018

(Sri Nirmalasari, S.E., M.Si)

Mengetahui,

Ka. Prodi

 10/8/2018

(Imron Burhan, M.Pd)

Direktur

 10/8/18

(Drs.H.Djudil Akrim, M.M)

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa 1 : AYU ASTUTI.S

NIM: 015 04 023

Dengan judul :

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI
KOTA MAKASSAR

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, Agustus 2018

Nama Mahasiswa

Tanda Tangan

AYU ASTUTI.S



ABSTRAK

Ayu Astuti,S, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Makassar (dibimbing oleh **Veronika Sari Den Ka**, dan **Sri Nirmala Sari**)

Pajak Daerah adalah pungutan wajib yang dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah dan kepentingan umum. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah digunakan beberapa variabel terkait yaitu jumlah penduduk, inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah, pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah dan pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan pajak daerah Kota Makassar. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Makassar. Penduduk Kota Makassar tetap bertumbuh tetapi tidak menyebabkan inflasi yang tinggi sehingga tidak mempengaruhi tingkat penerimaan pajak daerah. Penduduk Kota Makassar terindikasi produktif sehingga meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Kata kunci : Penerimaan Pajak Daerah, Jumlah Penduduk, Inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto

ABSTRACT

Ayu Astuti.S, Factors Affecting Regional Tax Revenue In Makassar City
(Supervised by **Veronika Sari Den Ka, and Sri Nirmala Sari**)

Regional Tax is a mandatory levy paid by the population of a certain area to the regional government that will be used for the benefit of the regional government and the public interest. To optimize local tax revenue, several related variables of population, inflation and Gross Regional Domestic Product. This study aims to determine the effect of population on local tax revenues, the influence of inflation on local tax revenues and the effect of Gross Regional Domestic Product on local tax revenue in the City of Makassar. Data analysis techniques used are multiple linear regression. The results of the study show that the population and inflation do not affect the local tax revenue and the Gross Regional Domestic Product affects the local tax revenue in Makassar City. Makassar City's population continues to grow but does not cause high inflation so it does not affect the level of local tax revenue. Makassar City's residents are indicated to be productive so as to increase local tax revenue.

Key Words : Regional Tax Revenue, Total Population, Inflation and Gross Regional Domestic Product

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Makassar” sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi Diploma III (D3) Perpajakan Politeknik Bosowa.

Penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, dorongan dan kesempatan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. H. Djudzil Akrim, M.M selaku Direktur Politeknik Bosowa
2. Bapak Imron Burhan, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa
3. Ibu Sri Nirmala Sari, S.E., M.Si. selaku wali Kelas Perpajakan B yang telah membantu dan memberi dukungan selama 3 tahun masa perkuliahan
4. Ibu Veronika Sari Den Ka, S.ST selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu serta memberikan masukan dan arahan yang memiliki kontribusi besar dalam penyusunan tugas akhir ini
5. Ibu Sri Nirmala Sari, S.E., M.Si. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta memberikan masukan dan arahan yang memiliki kontribusi besar dalam penyusunan tugas akhir ini
6. Segenap dosen Perpajakan Politeknik Bosowa yang telah memberikan banyak wawasan dan ilmu bagi penulis selama masa perkuliahan
7. Kepala Bagian Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dan segenap pegawai atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama melakukan penelitian
9. Seluruh Staff Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang telah membantu memberikan data penelitian yang peneliti butuhkan.
10. Kedua Orang tua yang senantiasa memberi nasihat, dukungan dan doa demi kemudahan penulis melakukan penelitian
11. Teman-teman Perpajakan B untuk segala bantuan, tawa dan kebersamaan selama 3 tahun masa perkuliahan
12. Teman-teman “JOFISAH Squad” Wahdah, Dian, Afni yang telah memberikan semangat dan informasi, baik dari informasi dunia perkuliahan maupun dari luar dunia perkuliahan
13. Semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tugas akhir ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan tugas akhir ini kedepannya agar bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, 01 September 2018

Penulis

Ayu Astuti.S

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Batasan Masalah.....	3
1.4. Tujuan Tugas Akhir.....	4
1.5. Manfaat Tugas Akhir	4
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	5
2.1. <i>Road Map</i> Penelitian.....	5
2.2. Teori Dasar	7
2.2.1. Teori Pemungutan Pajak	7
2.2.2. Pajak Daerah.....	8
2.2.3. Sumber Penerimaan Pajak Daerah	9
2.2.4. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	9
2.2.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah	10
2.3. Hipotesis.....	14
2.3.1 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah	14
2.3.2 Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah .	15

2.3.3	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Daerah.....	16
2.3.4	Pengaruh Jumlah Penduduk, Inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Daerah.....	16
BAB III.	METODE PENELITIAN	19
3.1.	Waktu dan Lokasi Penelitian	19
3.2.	Diagram Alir Penelitian	19
3.3.	Alat dan Bahan/Jenis dan Sumber Data	20
3.3.1	Jenis Data	20
3.3.2	Sumber Data.....	20
3.4.	Prosedur Pengambilan Data/Sampel.....	21
3.5.	Teknik Analisis Data	21
BAB IV.	PEMBAHASAN	25
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	25
4.1.1.	Sejarah Kantor	25
4.1.2.	Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	26
4.1.3.	Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	27
4.2.	Pengolahan Data	49
4.2.1	Deskripsi Variabel Penelitian.....	49
4.2.2	Analisis Data	53
4.3	Hasil Analisis Data.....	61
4.3.1	Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.....	61
4.3.2	Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah	62
4.3.3	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.....	63
4.3.4	Pengaruh Jumlah Penduduk, Inflasi dan PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.....	64

BAB V. Penutup	67
5.1. Kesimpulan	67
5.2. Saran	68

DAFTAR TABEL

Tabel IV-1 Jumlah Penduduk	49
Tabel IV-2 Inflasi	50
Tabel IV-3 Produk Domestik Regional Bruto	51
Tabel IV-4 Penerimaan Pajak Daerah	53
Tabel IV-5 Uji Multikolinearitas	56
Tabel IV-6 Uji Auto Korelasi.....	58
Tabel IV-7 Uji T.....	59
Tabel IV-8 Uji F.....	60
Tabel IV-9 Uji Koefisien Determinasi	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1 Roadmap Penelitian.....	7
Gambar III-1 Diagram Alir Penelitian	19
Gambar IV-1 Struktur Organisasi	29
Gambar IV-2 Uji Normalitas	55
Gambar IV-3 Uji Heteroskedastisitas	57

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Penerimaan Pajak Daerah
- Lampiran 2 Jumlah Penduduk
- Lampiran 3 Inflasi
- Lampiran 4 Produk Domestik Regional Bruto
- Lampiran 5 Tabel Distribusi F
- Lampiran 6 Tabel Distribusi T
- Lampiran 7 Uji Autokorelasi
- Lampiran 8 Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 9 Uji Multikolinearitas
- Lampiran 10 Uji Normalitas
- Lampiran 11 Analisis Regresi Berganda
- Lampiran 12 Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 13 Surat Menyelesaikan Penelitian
- Lampiran 14 Form Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran 15 Daftar Riwayat Hidup

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah.

Menurut undang-undang No. 32 tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [1].

Berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah terbagi menjadi empat yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menjadi tiga yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah [2].

Pajak Daerah adalah pungutan wajib yang dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah dan kepentingan umum. Adapun hal ini sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi yang dibagi menjadi lima yang terdiri dari Pajak

Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok dan Pajak Kabupaten/Kota yang dibagi menjadi sebelas yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah yaitu jumlah penduduk, inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan hasil penelitian jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah, jumlah penduduk berpengaruh terhadap (PAD) Kota Sorong dan variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah (Arianto, 2014, Asmuruf, dkk, 2015, Artha, dkk, 2016), sedangkan variabel jumlah penduduk berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah (Prasetyo, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian selanjutnya tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (Prasetyo, 2016), variabel inflasi memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah (Artha, dkk, 2016), inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah (Arianto, 2014) dan inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah (Haniz dan Sasana, 2013). Berdasarkan hasil penelitian PDRB berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak daerah di kota Surabaya, PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan

terhadap penerimaan pajak daerah dan variabel PDRB harga konstan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (Arianto, 2014, Artha, dkk, 2016 dan Prasetyo, 2016) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap (PAD) Kota Sorong (Asmuruf, dkk, 2015).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Makassar”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Makassar?
2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Makassar?
3. Apakah PDRB berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Makassar?
4. Apakah jumlah penduduk, inflasi dan PDRB berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Makassar?

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus, menghindari permasalahan yang dihadapi tidak terlalu luas, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang akan diangkat perlu dibatasi variabelnya. Maka dalam hal ini batasan yang ditentukan dari penulis bahwa faktor-faktor yang digunakan sebagai variabel penelitian ini menggunakan 1 variabel Dependen yakni pajak daerah dan 3 variabel Independen yakni jumlah penduduk, inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB). Jumlah penduduk adalah jumlah penduduk yang terdaftar selama 2012-2016. Inflasi adalah inflasi yang terjadi selama 2012-2016. PDRB adalah jumlah PDRB selama 2012-2016. Pajak daerah adalah penerimaan pajak daerah selama 2012-2016.

1.4. Tujuan Tugas Akhir

- a. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Makassar.
- c. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Makassar.
- d. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, inflasi dan PDRB secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Makassar.

1.5. Manfaat Tugas Akhir

- a. Bagi Peneliti

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman penulis tentang penerimaan pajak daerah di Kota Makassar.

- b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi mengenai pajak daerah di Kota Makassar.

- c. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pajak daerah.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Road Map Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Haniz dan Sasana (2013) dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kota Tegal. Penelitian bertujuan untuk meneliti pengaruh wajib pajak, pendapatan perkapita, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yaitu terdapat pengaruh positif wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah [3].

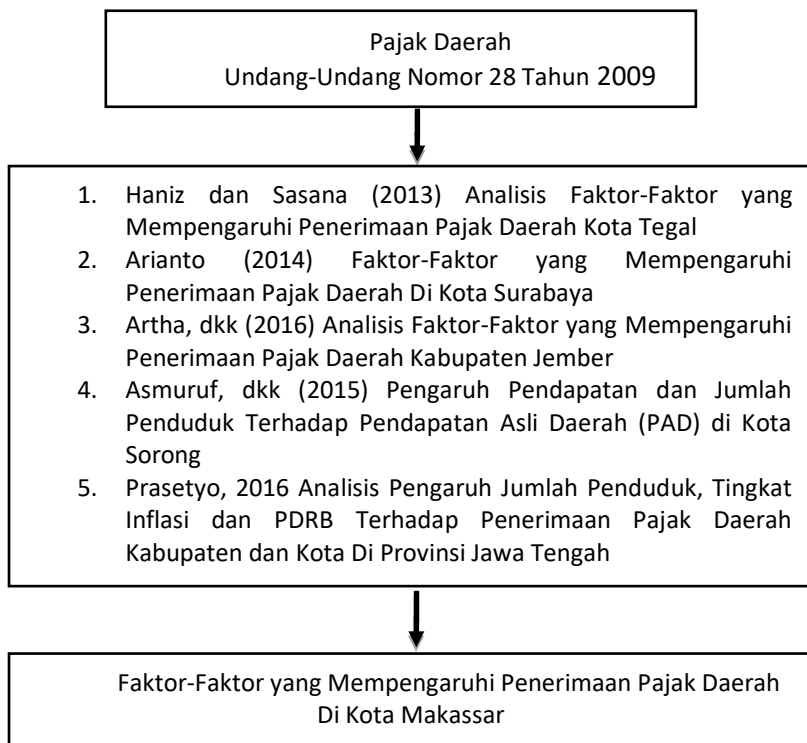
Penelitian yang dilakukan oleh Arianto (2014) dengan judul tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di kota surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah, pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah, dan pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah kota surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian yaitu variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah, variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan dan juga berpengaruh negatif terhadap pajak daerah, variabel PDRB mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pajak daerah [4].

Penelitian yang dilakukan oleh Artha, dkk (2016) dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kabupaten jember. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, PDRB, dan inflasi terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten jember. Metode yang digunakan adalah regresi

linear berganda dengan metode kuadrat terkecil. Hasil dari penelitian yaitu variabel jumlah penduduk dan PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dan variabel inflasi memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah [5].

Penelitian yang dilakukan oleh Asmuruf, dkk (2015) dengan judul pengaruh pendapatan dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap PAD dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD di Kota Sorong. Metode yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda. Dari hasil penelitian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap (PAD) Kota Sorong, Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap (PAD) Kota Sorong [6].

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2016) dengan judul Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi dan PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh jumlah penduduk, tingkat inflasi, dan PDRB terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, variabel PDRB harga konstan dan tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah [7].



Gambar II-1 Roadmap Penelitian

2.2. Teori Dasar

2.2.1. Teori Pemungutan Pajak

2.2.1.1 Teori Asuransi

Asuransi ialah sebuah persetujuan yang dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang sebagai pengganti kerugian, yang mungkin diderita oleh yang dijamin, karena diakibatkan dari suatu peristiwa yang belum jelas (Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H). Menurut Prof. Mehr dan Cammack menyatakan bahwa Asuransi ialah suatu alat untuk

mengurangi risiko keuangan, dengan cara sebuah pengumpulan unit-unit eksposur (*exposure*) dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu bisa diperkirakan.

Menurut Prof. Mark R. Green menyatakan bahwa Asuransi ialah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi suatu risiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya yang sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh bisa diramalkan dalam batas-batas tertentu [8].

2.2.1.2 Teori Gaya Pikul

Gaya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak untuk kebutuhannya yang primer (Prof. W. J. de Langen). Menurut Mr. A.j. Caren Stuart menyatakan asas gaya pikul dengan sebuah jembatan dengan menjelaskan bahwa yang pertama harus dipikul adalah bobot jembatan itu sendiri baru kemudian dibebani dengan beban yang lain. Menurut Mr. Dr. J. H. R. Sinninghe Damste gaya pikul adalah akibat dari bermacam-macam komponen terutama pendapatan, kekayaan dan susunan dari keluarga wajib pajak itu dengan mengingat faktor-faktor yang mempengaruhi keadaanya.

Menurut Luqman teori gaya pikul adalah pajak yang dibayar menurut dengan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang atau badan [9].

2.2.2. Pajak Daerah

Pajak menurut Charles E. McLure adalah kewajiban keuangan yang dikenakan pada wajib pajak (individual) oleh Negara atau

lembaga yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik [10].

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak Daerah yang tarutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [11].

2.2.3. Sumber Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah terbagi menjadi 4 yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain Penerimaan yang Sah.

2.2.4. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, belum mencukupi kebutuhan daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada 21 November 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah [12].

2.2.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah

2.2.5.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2014 tercatat sebanyak 1.429.242 jiwa yang terdiri dari 706.814 laki-laki dan 722.428 perempuan. Sementara itu jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2013 tercatat sebanyak 1.408.072 jiwa. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar pada tahun 2014 yaitu sekitar 97,84 persen, yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 98 penduduk laki-laki. Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Biringkanaya yaitu sebanyak 190.829 atau sekitar 13,35 persen dari total penduduk, disusul Kecamatan Tamalate sebanyak 186.921 jiwa (13,08 persen). Kecamatan Rappocini sebanyak 160.499 jiwa (11,23 persen) dan yang terendah adalah Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 28.053 jiwa (1,96 persen). Ditinjau dari kepadatan penduduk Kecamatan Makassar adalah terpadat yaitu 33.339 jiwa per km persegi, sedangkan Kecamatan Tamalanrea merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 3.438 jiwa km persegi, kemudian Kecamatan Biringkanaya 3.957 jiwa per km persegi, Kecamatan Manggala 5.447 jiwa per km persegi. Wilayah-wilayah yang kepadatan penduduknya masih rendah tersebut masih memungkinkan untuk pengembangan daerah pemukiman terutama di 3 Kecamatan yaitu Biringkanaya, Tamalanrea dan Manggala. [13]

Jumlah penduduk adalah pertumbuhan penduduk yang besar bila diikuti oleh tingkat produktivitas yang tinggi akan menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Tingginya pertumbuhan ekonomi akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan tingkat pendidikan dan pada akhirnya akan mampu memperbaiki mutu dan citra hidup. Akan tetapi ternyata media berupa tanah (bumi) ini tidaklah bertambah dan bila eksploitasi berjalan terus menerus tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tahannya maka akan secara cepat pula kemampuannya menurun dan bila ini diteruskan akan berdampak pada kemiskinan. Untuk menghindari agar kejadian ini tidak cepat terjadi maka setiap pemerintah suatu negara menjalankan program kependudukan untuk mengatur jumlah kelahiran agar daya dukung ekonomi dapat seirama dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. [14]

Jumlah penduduk merupakan pasar yang potensial bagi hasil produksi dan jasa. Rahdina (2008), menguji jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah. Akan tetapi hubungan jumlah penduduk dengan penerimaan pajak daerah adalah semakin tinggi jumlah penduduk suatu daerah maka penerimaan pajak daerah tersebut juga meningkat. Menurut Arianto (2014) jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.

2.2.5.2 Inflasi

Inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program sistem pengadaan komoditi (produksi, penentuan harga, pencetakan uang dan lain sebagainya) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh

masyarakat. Sebenarnya inflasi bukan masalah yang terlalu berarti apabila keadaan tersebut diiringi oleh tersedianya komoditi yang diperlukan secara cukup dan ditimpali dengan naiknya tingkat pendapatan yang lebih besar dari % tingkat inflasi tersebut (daya beli masyarakat meningkat lebih besar dari tingkat inflasi). Akan tetapi manakala biaya produksi untuk menghasilkan komoditi semakin tinggi yang menyebabkan harga jualnya juga menjadi relatif tinggi sementara disisi lain tingkat pendapatan masyarakat relatif tetap maka barulah inflasi ini menjadi sesuatu yang “membahayakan” apalagi bila berlangsung dalam waktu yang relatif lama dengan porsi berbanding terbalik antara tingkat inflasi terhadap tingkat pendapatan (daya beli).

Menurut Iwan Susanto (2014) Inflasi adalah laju pertumbuhan atas permintaan yang tidak diimbangi dengan penawaran maka yang terjadi gangguan terhadap kestabilan harga (inflasi) [15]. Berdasarkan penelitian sebelumnya mengatakan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Menurut Arianto (2014) Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan yaitu inflasi ringan, sedang, berat dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada dibawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%-30% setahun; berat antara 30%-100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada diatas 100% setahun. Berdasarkan

penelitian sebelumnya mengatakan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

2.2.5.3 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah yang di definisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu 1 tahun di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil penghitungan PDRB tahun 2013, nilai PDRB Kota Makassar atas dasar harga yang berlaku telah mencapai Rp 58.802,552 miliar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2013, nilainya sebesar Rp 21.327,227 miliar rupiah. Struktur ekonomi bisa memberikan gambaran masing-masing sektor dalam pembentukan total PDRB suatu daerah. Semakin besar persentase suatu sektor semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perekonomian daerah. Struktur Kota Makassar masih didominasi oleh sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel.

Menurut Himawan (2016), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu [16]. Akan tetapi hubungan PDRB dengan penerimaan pajak daerah adalah harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pertahun berjalan.

Menurut Arianto (2014) Produk Domestik Regional Bruto ialah untuk melihat perkembangan riil produk domestik dari tahun ketahun. Karena adanya inflasi, maka daya beli uang akan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Berkaitan dengan itu, apakah kenaikan PDRB benar-benar naik atau tidak, maka faktor

inflasi ini terlebih dahulu harus di eliminir. Setelah PDRB yang riil yang besarnya hanya dipengaruhi oleh jumlah produksinya saja. Berdasarkan penelitian sebelumnya mengatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

2.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori dan belum menggunakan fakta. Oleh karena itu, setiap penelitian yang dilakukan memiliki suatu hipotesis atau jawaban sementara terhadap penelitian yang akan dilakukan. Dari hipotesis tersebut akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan apakah hipotesis tersebut benar adanya atau tidak benar.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dapat menyusun hipotesis mengenai permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

2.3.1 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Jumlah penduduk merupakan pasar yang potensial bagi hasil produksi dan jasa, menguji jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Menurut Arianto (2014) jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Menurut Asmuruf, dkk (2015) jumlah penduduk

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut Helti (2013) Jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap banyaknya wajib pajak guna membayar pajak daerah, semakin besar laju pertumbuhan jumlah penduduk akan ada kemungkinan untuk menambah jumlah penerimaan pajak daerah. sehingga jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

Ha₁ : Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah

2.3.2 Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan jika dihitung menggunakan t-hitung terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut didapatkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Menurut Arianto (2014) Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan jika dihitung menggunakan t-hitung terhadap penerimaan pajak daerah. sehingga akan berdampak pada penerimaan pajak daerah. Menurut Haniz dan Sasana (2013) Inflasi tidak berpengaruh terhadap realisasi perolehan pajak daerah. Menurut Artha, dkk (2015) Inflasi memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

Ha₂ : Inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah

2.3.3 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Dengan meningkatnya PDRB akan semakin tinggi pula ekonomi daerah tersebut dan bisa membayar pajak dengan tertib juga memungkinkan daerah untuk menarik pajak yang lebih tinggi dari sebelumnya. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa PDRB berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Menurut Arianto (2014) PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Menurut Artha, dkk (2015) PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Menurut Helti (2013) PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

Ha₃ : PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah

2.3.4 Pengaruh Jumlah Penduduk, Inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Menurut Aryanti, dkk (2013) jumlah penduduk, inflasi dan PDRB berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Susanto (2013) hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel jumlah penduduk, inflasi dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut Shiska, dkk (2013) jumlah penduduk, inflasi dan PDRB berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

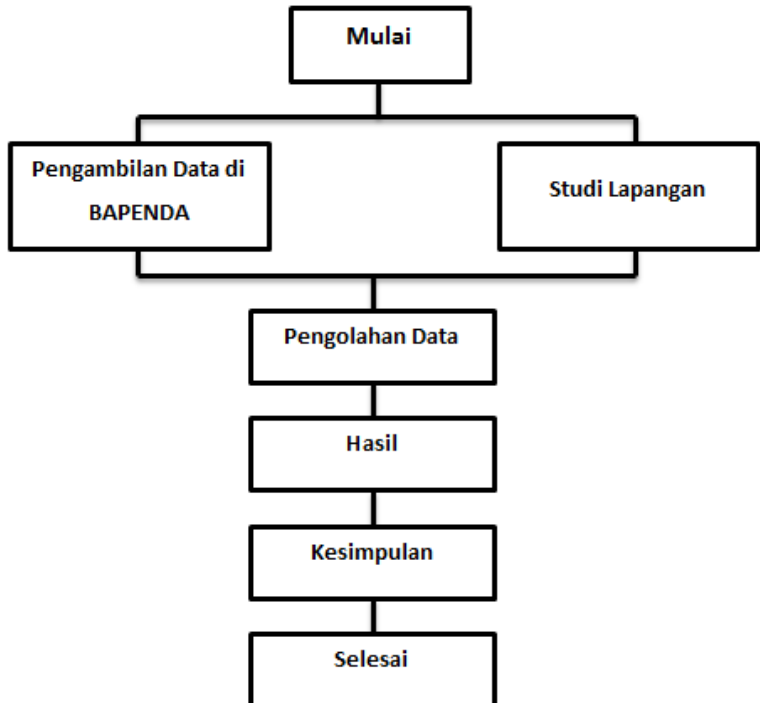
Ha₄ : Pengaruh Jumlah penduduk, inflasi dan PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No.8, Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90144. Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan maret sampai dengan agustus 2018.

3.2. Diagram Alir Penelitian



Gambar III-1 Diagram Alir Penelitian

3.3. Alat dan Bahan/Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010) data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Data kuantitatif berupa hasil dari jumlah realisasi penerimaan pajak daerah [17].

3.3.2 Sumber Data

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono 2015:137) [18]. Sumber data dalam penelitian ini melibatkan 3 variabel independen sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata pencaharian tetap di daerah itu serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Data diperoleh dari kantor Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) dan diukur dalam satuan Jiwa di Kota Makassar .
2. Inflasi adalah kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian dari satu periode ke periode lainnya di Kota Makassar. Data tersebut dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinyatakan dalam satuan persen.
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu

dalam waktu tertentu (satu tahun). Data di dapat dari kantor Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) dan diukur dalam satuan Rupiah di Kota Makassar.

3.4. Prosedur Pengambilan Data/Sampel

Proses pengambilan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Teknik pengambilan sampel, penulis menetapkan jumlah sampel (n) yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* bulanan realisasi penerimaan pajak daerah, jumlah penduduk, inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama 5 tahun terakhir (2012-2016) yaitu sebanyak 60 sampel (5 tahun x 12 bulan).

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode analisis data regresi linear berganda untuk mengetahui hubungan antara variabel independen yaitu jumlah penduduk (X_1), inflasi (X_2), PDRB (X_3) terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak daerah (Y).

Di dalam penggunaan analisis regresi linear berganda, diperlukan beberapa pengujian terlebih dahulu yaitu pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

a. Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen (jumlah

penduduk (X_1), inflasi (X_2) dan PDRB (X_3) dan variabel dependen (penerimaan pajak daerah (Y)) mempunyai distribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel independen.
3. Uji Heteroskedstisitas adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi.
4. Uji Autokorelasi adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi terdapat korelasi antar variabel pengganggu.

b. Pengujian Hipotesis

1. Uji Signifikan Parsial (Uji T) adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen yaitu jumlah penduduk (X_1), inflasi (X_2) dan PDRB (X_3) terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak daerah (Y) secara parsial (masing-masing variabel).
2. Uji Signifikan Simultan (Uji F) adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen yaitu jumlah penduduk (X_1), inflasi (X_2) dan PDRB (X_3) terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak daerah (Y) secara simultan (bersama-sama).
3. Uji Koefisien Determinasi (R^2) adalah pengujian yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana variabel independen (jumlah

pajak daerah (X_1), inflasi (X_2) dan PDRB (X_3) dalam menjelaskan variabel dependen (penerimaan pajak daerah (Y)).

BAB IV. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Kantor

Badan Pendapatan Kota Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah sebelum dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 155/Kep/A/V/1973 Tanggal 24 Mei 1973 terdiri dari beberapa Sub Dinas Terminal Angkutan, Sub Dinas Pengelolaan Tanah Pasir, Sub Dinas Taman Hiburan Rakyat, Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi.

Adanya Keputusan Walikota yang terdapat dalam Keputusan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S/Kep/A/V1977 Tanggal 1 April 1977 bersama dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 Tanggal 9 September 1975 dan Instruktur Menteri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Badan Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang telah disempurnakan dan ditetapkan perubahan namanya menjadi Dinas Penghasilan Daerah.

Dinas Penghasilan Daerah tersebut menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pajak Parkir dan semua Sub-sub Dinas dalam unit penghasilan daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang. Seiring dengan adanya perubahan Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas Daerah Kota Ujung Pandang berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar.

DISPENDA Kota Makassar berganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar yang kedudukan serta susunan organisasinya diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 110 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja badan pendapatan daerah Kota Makassar. Dalam aturan tersebut disebutkan dengan jelas hak dan kewajiban serta kedudukan BAPENDA Kota Makassar.

4.1.2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

1. Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu Prima dalam pelayanan dan unggul dalam pengelolaan Pendapatan Daerah.
2. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut.
 - a. Menggali sumber-sumber PAD secara optimal.
 - b. Menyempurnakan sistem pengelolaan PAD.
 - c. Meningkatkan koordinasi.
 - d. Menyusun/merevisi kembali Peraturan Daerah.
 - e. Meningkatkan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah.
 - f. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.
 - g. Melakukan evaluasi secara berkala.
 - h. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
- i. Meningkatkan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan agar terbina kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

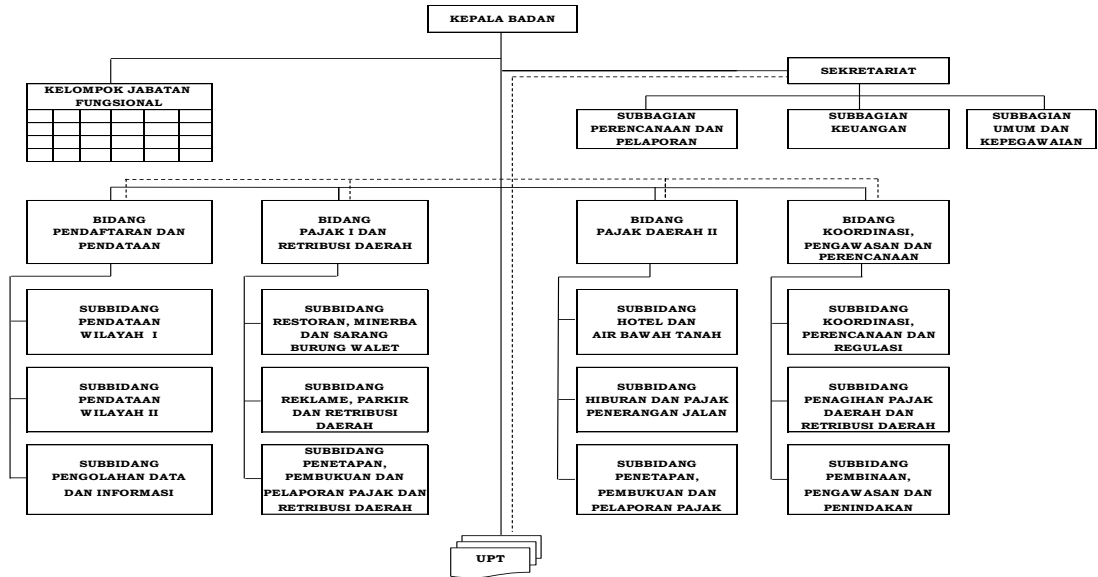
Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu merumuskan, membina, mengendalikan, dan mengelolah serta mengkoordinir kebijakan bidang pendapatan daerah. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut :

1. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pendapatan Daerah;
2. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi badan;
3. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang Pendaftaran dan Pendataan, Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah, Bidang Pajak Daerah II dan Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan;
4. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) badan;
5. mengoordinasikan dan mermuskan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
6. merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) badan;

7. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) badan;
8. mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
9. menyelenggarakan pembinaan, pemeriksaan, pengawasan, pengendalian, dan penindakan terhadap pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, deviden Badan Usaha Milik Daerah dan penerimaan daerah lainnya;
10. menyelenggarakan pelayanan administrasi pengelolaan dan pemungutan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan, serta Pajak/ Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah lainnya.
11. melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
12. melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi ke pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya;
13. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
14. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar
 Nomor : 110 Tahun 2016
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH



Gambar IV-1 Struktur Organisasi

Berdasarkan struktur organisasi diatas, maka dapat dirincikan tugas-tugas setiap bagian:

1. Kepala Daerah

Merencanakan, merumuskan, mengembangkan, mengkoordinasi, dan mengendalikan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu di bidang pendapatan.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan badan. Adapun uraian tugas sekretaris yaitu :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat;
- b. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sekretariat;
- e. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sekretariat

- f. Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyiapan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) badan;
- h. Mengkordinasikan setiap bidang dalam pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;

3. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan. Adapun uraian tugas subbagian perencanaan dan pelaporan adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Menghimpun bahan dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) badan;

- d. Menghimpun bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) badan;
 - e. Menghimpun dan menganalisa data pelaporan kegiatan dari setiap bidang sebagai bahan evaluasi;
 - f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - g. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
4. Sub bagian Keuangan

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan. Adapun uraian tugas subbagian keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbagian Keuangan;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Keuangan;
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Meneliti dan memverifikasi kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan dokumen pencairan anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) lingkup dinas;
 - f. Menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian. Adapun tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup badan;
 - e. Meminta dan menganalisa rencana kebutuhan barang unit dari setiap bidang;
 - f. Membuat daftar kebutuhan barang dan rencana tahunan barang unit;

- g. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan barang;
- h. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian barang di lingkup badan;
- i. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris Daerah;
- j. Melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler badan;

6. Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi serta rancang bangun dan pengembangan pengolahan data dan informasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun uraian tugas bidang pendaftaran dan pendataan adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan operasional di bidang pendaftaran dan pendataan;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang pendaftaran dan pendataan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pendaftaran dan pendataan;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pendaftaran dan pendataan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

7. Sub bidang Pendataan Wilayah I

Sub bidang Pendataan Wilayah I mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi Pendaftaran, Pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan

verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah I, meliputi Kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, Rappocini, Tallo, Tamalate, Ujung Pandang dan Wajo. Adapun tugas Sub bidang Pendataan Wilayah I adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pendataan Wilayah I;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pendataan Wilayah I;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pendataan Wilayah I;
- d. Melaksanakan dukungan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, updating, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah I;

8. Sub bidang Pendataan II

Sub bidang Pendataan Wilayah II mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah II, meliputi Kecamatan Biringkanaya, Bontoala, Manggala, Panakkukang, Tamalanrea, Ujung Tanah, Kepulauan Sangkarang. Adapun tugas Sub bidang Pendataan Wilayah II adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pendataan Wilayah II;

- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pendataan Wilayah II;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pendataan Wilayah II;
- d. Melaksanakan dukungan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, updating, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah II;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

9. Sub bidang Pengolahan Data dan Informasi

Subbidang pengolahan data dan informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi verifikasi dan validasi data wajib pajak dan retribusi daerah, penetapan dan pengukuhan wajib pajak, penerbitan NPWPD, pengolahan data dan informasi serta rancang bangun pengembangannya. Adapun tugas Subbidang Pengolahan Data dan Informasi adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;

- d. Melaksanakan pelayanan administrasi verifikasi dan validasi data wajib pajak dan retribusi daerah, penetapan dan pengukuhan wajib pajak, penerbitan NPWPD, pengolahan data dan informasi serta rancang bangun pengembangannya;
 - e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
10. Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah

Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak I meliputi Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir dan penataan obyek Pajak Reklame serta retribusi daerah. Adapun tugas Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah;
- b. Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah;
- c. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah;

- d. Melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak I meliputi Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir dan penataan Obyek Pajak Reklame serta retribusi daerah;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

11. Sub bidang Restoran, Minerba, dan Sarang Burung Walet

Sub bidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan pajak restoran, pajak mineral bukan logam, dan pajak sarang burung wallet. Adapun tugas Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet;
- d. Melaksanakan dukungan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, dan Pajak Sarang Burung Wallet;

- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

12. Sub bidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah

Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan, Pajak Parkir dan penataan obyek Pajak Reklame serta retribusi daerah. Adapun uraian tugas subbidang reklame, parkir dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah;
- d. Melakukan dukungan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Retribusi Daerah;

- e. Melakukan penyusunan rancang bangun penataan, pengendalian dan pengelolaan obyek pajak reklame dan retribusi daerah;
 - f. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
13. Sub bidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah

Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perhitungan, analisa dokumen pembayaran, penetapan, keberatan, pengurangan dan perubahan keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- e. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

14. Bidang Pajak Daerah II

Bidang Pajak Daerah II yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak II meliputi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Bawah Tanah.

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Pajak Daerah II;
- b. Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Pajak Daerah II;
- c. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Pajak Daerah II;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak I meliputi Pajak Hotel, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

15. Sub bidang Hotel dan Air Bawah Tanah

Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Hotel dan Pajak Air Bawah Tanah. Adapun uraian tugas Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah ialah sebagai berikut

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah;
- d. Melaksanakan dukungan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Hotel dan Pajak Air Bawah Tanah;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

16. Sub bidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan

Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN. Adapun uraian tugas subbidang hiburan dan pajak penerangan jalan ialah sebagai berikut

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- d. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

17. Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak

Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perhitungan, analisa dokumen pembayaran, penetapan, keberatan, pengurangan dan perubahan keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan Pajak Hotel, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak

Penerangan Jalan Non PLN. Adapun uraian tugas seksi penetapan, pembukuan dan pelaporan pajak ialah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi perhitungan, analisa dokumen pembayaran, penetapan, keberatan, pengurangan dan perubahan keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan Pajak Hotel, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- h. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

18. Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan

Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, koordinasi, rekonsiliasi, pembinaan, pemeriksaan, penindakan, pengenaan sanksi, merumuskan regulasi pajak dan retribusi daerah serta perencanaan target pendapatan daerah. Adapun uraian tugas bidang koordinasi, pengawasan dan perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan;
- b. Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan;
- c. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, penindakan, pengenaan sanksi, keberatan, banding, penyitaan, pengusulan lelang aset, dan perencanaan target pendapatan daerah;
- e. Menyenggarakan pemeriksaan kepatuhan dan kepatutan terhadap obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah terhadap tunggakan pajak dan retribusi daerah untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Melaksanakan rekonsiliasi realisasi penerimaan dan piutang pendapatan daerah bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta unit kerja terkait;
- g. Melakukan reviu dan analisis perundang-undangan pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta perumusan ketentuan pelaksanaannya;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

19. Sub bidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi

Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi mempunyai tugas melakukan analisa dan perencanaan target pendapatan, rekonsiliasi penerimaan dan piutang, pengusulan penghapusan piutang, reviu dan analisa perundang-undangan bidang pajak daerah dan retribusi daerah serta ketentuan pelaksanaannya. Adapun uraian tugas subbidang koordinasi, perencanaan, dan regulasi ialah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi;
- d. Menganalisa, memeriksa dan mengkonsolidasikan usulan penetapan target pendapatan yang bersumber dari Pajak

Daerah, Retribusi Daerah, deviden Badan Usaha Milik Daerah, dan sumber pendapatan sah lainnya.

- e. Melaksanakan rekonsiliasi realisasi penerimaan dan piutang pendapatan daerah bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta unit kerja terkait;

20. Sub bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi penagihan tunggakan piutang pajak daerah dan retribusi daerah, keberatan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangann sanksi administrasi dan pengembalian kelebihan pembayaran.

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi penagihan tunggakan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangann sanksi administrasi dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

21. Sub bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan

Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pemeriksaan, pengawasan dan penindakan, pengenaan sanksi, banding, penyitaan terhadap pelanggaran pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun uraian tugas subbidang pembinaan, pengawasan, dan penindakan ialah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan;
- b. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan;
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan;
- d. Melaksanakan dukungan administrasi pembinaan, pengawasan, penindakan, pengenaan sanksi, keberatan, banding, penyitaan, dan pengusulan lelang aset terhadap pelanggaran pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Menyelenggarakan pemeriksaan kepatuhan dan kepatutan terhadap obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah terhadap tunggakan pajak dan retribusi daerah untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4.2. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yakni metode dokumentasi. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu jumlah penduduk, inflasi, PDRB dan realisasi penerimaan pajak daerah.

4.2.1 Deskripsi Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu satu variabel terikat (dependen) dan tiga variabel bebas (independen). Dalam penelitian ini deskripsi variabel penelitian sebagai berikut :

4.2.1.1. Jumlah Penduduk (X1)

Data jumlah penduduk diperoleh melalui metode dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk perbulan, hasil deskripsi data jumlah penduduk adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel IV-1 Jumlah Penduduk

Bulan	Jumlah Penduduk (dalam satuan jiwa)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Januari	47.129	48.133	48.531	48.882	59.292
Febuari	54.515	55.578	55.937	56.243	59.430
Maret	56.831	58.060	58.558	59.000	61.007
April	82.027	83.550	84.014	84.396	84.758
Mei	105.234	108.024	109.471	110.826	105.759
Juni	115.694	118.026	118.864	119.594	112.170
Juli	122.838	127.915	131.500	135.049	138.659
Agustus	134.783	137.260	137.997	138.598	139.167
September	142.308	145.132	146.121	146.968	147.783

Bulan	Jumlah Penduduk (dalam satuan jiwa)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Oktober	154.184	158.325	160.499	162.539	164.563
November	176.947	183.039	186.921	190.694	194.493
Desember	177.116	185.030	190.471	196.612	202.520

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar 2012-2016

Berdasarkan Tabel IV.1 diketahui bahwa variabel jumlah penduduk pada Badan Pusat Statistik Kota Makassar pada tahun 2012 mencapai 1.369.606 jiwa dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 1.469.601 jiwa pada tahun 2016 di Kota Makassar.

4.2.1.2. Inflasi (X2)

Data inflasi diperoleh melalui metode dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah inflasi dirinci menurut perbulan, hasil deskripsi data inflasi adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel IV-2 Inflasi

Bulan	Inflasi (dalam satuan persen)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Januari	1,26	1,19	1,20	1,48	1,36
Febuari	0,35	0,73	0,25	-0,11	-0,02
Maret	0,38	0,25	0,02	0,07	0,17
April	0,36	-0,10	0,33	0,04	-0,39
Mei	-0,58	-0,24	-0,28	0,07	-0,10
Juni	0,64	0,55	0,25	0,09	0,30
Juli	0,60	3,03	1,11	0,15	1,13

Bulan	Inflasi (dalam satuan persen)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Agustus	1,17	1,48	0,50	0,35	-0,45
September	-0,12	-0,10	0,39	0,11	0,41
Oktober	-0,10	-0,74	0,43	0,29	0,02
November	-0,10	-0,76	1,36	0,23	0,43
Desember	0,63	0,84	2,69	0,18	0,29

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar 2012-2016

Berdasarkan Tabel IV.2 diketahui bahwa variabel inflasi pada Badan Pusat Statistik Kota Makassar mengalami fluktuasi dan tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan tingkat inflasi sebesar 3,03, sedangkan tingkat inflasi terendah terjadi pada tahun 2016 dengan tingkat inflasi sebesar 0,02.

4.2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (X3)

Data PDRB diperoleh melalui metode dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha dirinci menurut perbulan, hasil deskripsi data inflasi adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel IV-3 Produk Domestik Regional Bruto

Bulan	Produk Domestik Regional Bruto (dalam jutaan rupiah)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Januari	211.460,0	227.260,0	236.430,2	235.405,9	243.617,7
Februari	404.796,8	433.126,8	466.747,8	479.079,9	496.354,1
Maret	785.084,8	849.168,1	906.036,7	952.180,3	1.009.674,0

Bulan	Produk Domestik Regional Bruto (dalam jutaan rupiah)				
	2012	2013	2014	2015	2016
April	2.533.541,8	2.567.846,2	2.607640,9	2.896.939,6	2.736.850,0
Mei	2.597.283,8	2.834.579,8	3.100.366,0	3.347.925,1	3.418.456,4
Juni	3.531.681,9	3.794.461,1	4.110.608,4	4.417.130,2	4.836.095,8
Juli	3.972.650,0	4.312.826,3	4.547297,9	4.882.227,1	5.515.393,4
Agustus	6.420.883,7	7.000.997,8	7.409.071,4	7.999.269,7	8.596.482,6
September	10.900.007,8	12.038.047,7	13.279.990,3	14.332.383,2	15.547.110,3
Oktober	11.257.030,7	12.533.233,1	13.284.167,7	14.415.639,0	15.580.789,4
November	13.685.157,2	14.556.071,9	15.658.926,9	16.762.338,0	18.314.944,6
Desember	14.551.456,4	15.759.792,0	16.985.534,3	18.029.660,3	19.541.216,2

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar 2012-2016

Berdasarkan Tabel IV.3 diketahui bahwa variabel PDRB pada Badan Pusat Statistik Kota Makassar selalu meningkat secara nominal dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan PDRB dari tahun 2012-2016 yang tertinggi mencapai angka pertumbuhan sebesar 19.541.216,2, sedangkan pertumbuhan PDRB dari tahun 2012-2016 yang terendah sebesar 211.460,0.

4.2.1.4. Penerimaan Pajak Daerah

Data penerimaan pajak daerah diperoleh melalui metode dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah jumlah penerimaan perbulan dari Pajak Daerah, hasil deskripsi data penerimaan pajak daerah adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel IV-4 Penerimaan Pajak Daerah

Bulan	Penerimaan Pajak Daerah (dalam jutaan rupiah)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Januari	30.130	38.780	42.421	36.155	46.703
Februari	36.521	40.825	43.033	36.899	47.762
Maret	36.972	41.255	44.421	38.877	50.002
April	38.922	41.963	47.031	39.699	53.644
Mei	39.960	43.388	52.472	41.502	58.388
Juni	40.591	50.721	56.347	57.478	58.912
Juli	41.751	50.958	57.024	60.491	61.083
Agustus	50.857	52.290	58.740	69.522	80.481
September	59.470	59.785	60.020	70.121	88.341
Oktober	59.950	62.295	62.420	79.580	88.677
November	60.321	63.970	65.323	88.321	97.942
Desember	60.751	65.820	66.104	91.311	147.639

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar 2012-2016

Berdasarkan Tabel IV.4 diketahui bahwa penerimaan pajak daerah di Kota Makassar terlihat adanya peningkatan dari tahun ke tahun dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2016 sebesar 147.639.209.279.

4.2.2 Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode analisis data regresi

linear berganda. Didalam penggunaan analisis regresi linear berganda, diperlukan beberapa pengujian terlebih dahulu yaitu :

4.2.2.1 Uji asumsi klasik

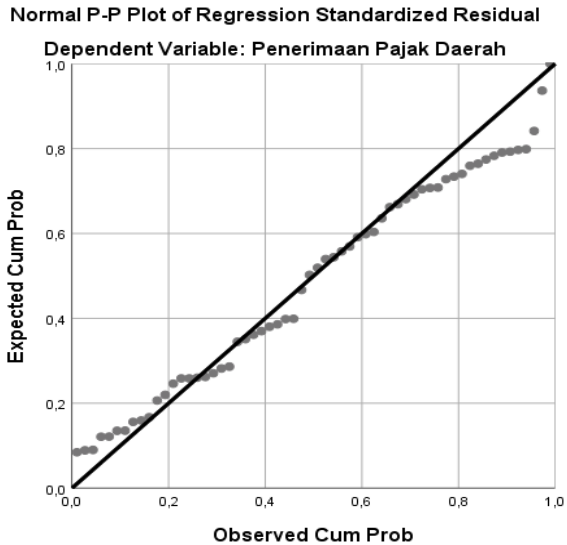
Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Apabila ingin mengetahui apakah residual berdistribusi normal maka dalam penelitian ini digunakan uji statistik one sampel kolmogrov smirnov. Residual yang normal adalah yang memiliki nilai signifikan diatas 0,05. Pada gambar normal probability plot distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Jika data menyebar jauh dan garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model asumsi normalitas tidak memenuhi uji asumsi normalitas.

Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat tabel pada gambar berikut ini:



Gambar IV-2 Uji Normalitas

Sumber : Data diolah (2018)

Berdasarkan grafik Normal *P-Plot* pada gambar IV.2 pola grafik normal terlihat dari titik- titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan grafik Normal *P- plot*, menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai *Varians Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai tolerancenya lebih kecil dari

0,10 maka tidak terdapat hubungan antara variabel-variabel independen (tidak terjadi multikolinieritas).

Tabel IV-5 Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,887E+10	6536022793		5,948	,000		
	Jumlah Penduduk	11456,510	89188,512	,028	,128	,898	,124	8,076
	Inflasi	-1977099750	2110283347	-,071	-,937	,353	,994	1,006
	PDRB	2526,811	689,046	,791	3,667	,001	,124	8,086

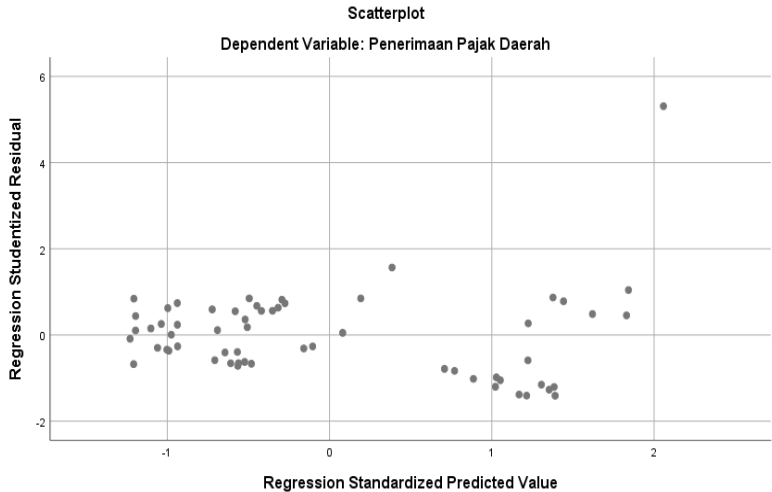
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah

Sumber : Data diolah (2018)

Berdasarkan tabel diatas hasil perhitungan nilai *Tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* juga menunjukkan hal sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residu pengamatan ke pengamatan lain berbeda berarti ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. Model regresi yang baik tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.



Gambar IV-3 Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah (2018)

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar secara merata di atas dan di bawah garis nol, tidak berkumpul di satu tempat, serta tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa uji regresi ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

d. Uji AutoKorelasi

Uji Autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Pengujian yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi terdapat korelasi antar variabel pengganggu. Dengan menggunakan uji *Durbin Watson* (D-W) yang dimana menguji apakah dalam model regresi terjadi kesalahan pengganggu pada

periode yang satu ke yang sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.

Tabel IV-6 Uji Auto Korelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,823 ^a	,677	,660	1,13974E+10	,585

a. Predictors: (Constant), PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah

Sumber : Data diolah (2018)

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan nilai *Durbin-Watson* sebesar 0,585, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikan 0,05, jumlah sampel 60 (n) dan jumlah variabel 4 (k=4). Karena nilai *Durbin Watson* 0,585, $(4 - d) > dU$ dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi positif maupun negatif sehingga tidak terdapat autokorelasi.

4.2.2.2 Uji t (Parsial)

Pengujian secara parsial (uji t) dilakukan untuk menentukan apakah variabel jumlah penduduk, inflasi dan PDRB berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah secara parsial yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel IV-7 Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,887E+10	6536022793		5,948	,000
	Jumlah Penduduk	11456,510	89188,512	,028	,128	,898
	Inflasi	-1977099750	2110283347	-,071	-,937	,353
	PDRB	2526,811	689,046	,791	3,667	,001

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah

Sumber : Data diolah (2018)

Berdasarkan tabel IV.7 persamaan regresi linear berganda, yang dibaca adalah nilai dalam kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan koefisien variabel independen. Berdasarkan tabel IV.7 model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = (3.887E+10) + 11.456,510 X1 + -1.977.099.750 X2 + 2.526,811 X3$$

Nilai masing-masing koefisien regresi variabel independen dari model regresi linier berganda tersebut memberikan gambaran bahwa variabel PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah, yang artinya ketika PDRB naik, maka penerimaan pajak daerah juga akan naik. Sedangkan jumlah penduduk dan inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah.

4.2.2.3 Uji F (Simultan)

Pengujian hipotesis secara simultan (Uji F) yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen (jumlah penduduk (X1), inflasi (X2), dan PDRB (X3)) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (penerimaan pajak daerah (Y))

yang dilakukan dengan cara melihat F hitung. Apabila F hitung > F tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima atau jika F hitung < F tabel H_0 diterima dan H_a ditolak. Adapun hasil dari uji signifikansi simultan (uji F) dapat dilihat pada Tabel IV.8 sebagai berikut:

Tabel IV-8 Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,528E+22	3	5,092E+21	39,198	,000 ^b
	Residual	7,274E+21	56	1,299E+20		
	Total	2,255E+22	59			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah

b. Predictors: (Constant), PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk

Sumber : Data diolah (2018)

Dari pengujian simultan (uji F) pada tabel IV.8 F hitung menghasilkan 39,198 yang lebih besar dari F tabel ($39,198 > 2,76$). Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk, inflasi dan PDRB secara simultan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.

4.2.2.4 Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai *R Square* (R^2) untuk mengetahui seberapa jauh “Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah”. Adapun hasil uji determinasi yaitu:

Tabel IV-9 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,823 ^a	,677	,660	1,13974E+10

a. Predictors: (Constant), PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk

Sumber : Data diolah (2018)

Berdasarkan tabel IV.9, diketahui bahwa nilai *R Square* sebesar 0,677 hal ini berarti 67,7% variasi dari variabel dependen (penerimaan pajak daerah) dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen (jumlah penduduk, inflasi dan PDRB). Sedangkan sisanya ($100\% - 67,7\% = 32,3\%$) dijelaskan oleh variabel diluar penelitian ini.

4.3 Hasil Analisis Data

4.3.1 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan tabel IV.7 secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 0,128 dengan signifikansi 0,898. Jumlah penduduk tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah, karena nilai signifikan lebih besar 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada jumlah penduduk akan berpengaruh secara tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,128, hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, “jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah”, ditolak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Prasetyo (2016) yang menunjukkan jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Hal ini dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Hasil pemungutan pajak tidak hanya digunakan untuk memasukkan ke dalam kas negara saja, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan. Kebijakan fiskal adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah untuk menstabilisasikan atau mendorong tingkat aktivitas ekonomi.

Hipotesis tersebut juga di dukung oleh penambahan jumlah penduduk pada tabel IV.1 dimana jumlah penduduk mengalami peningkatan namun tidak mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

4.3.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan tabel IV.7 secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar $-0,937$ dengan signifikansi $0,353$. Inflasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah, karena nilai signifikan lebih besar $0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada inflasi akan berpengaruh secara tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan koefisien regresi sebesar $-0,937$, hal ini menunjukkan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, “inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah”, ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Artha, dkk (2015) yang menunjukkan inflasi memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Hal ini dapat dilihat bahwa apabila inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Inflasi juga digunakan untuk peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung pada tinggi atau rendahnya inflasi.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa dimana terjadi peningkatan inflasi pada tabel IV.2 namun tidak mempengaruhi kenaikan penerimaan pajak daerah.

4.3.3 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan tabel IV.7 secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 3,667 dengan signifikansi 0,001. PDRB berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada inflasi akan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan koefisien regresi sebesar 3,667, hal ini menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Pengaruh positif yang mengindikasikan bahwa apabila PDRB mengalami

kenaikan maka angka penerimaan pajak daerah juga mengalami kenaikan.

Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, “PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah”, dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Helti (2013) PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Hal ini dapat dilihat bahwa PDRB merupakan nilai tambah barang atau jasa yang diperoleh di dalam suatu wilayah atau daerah dalam waktu satu tahun tertentu. Semakin besar PDRB maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin tinggi. Bila pertumbuhan ekonomi meningkat maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat, peningkatan tersebut perlu diimbangi dengan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung pembangunan daerah.

Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa dimana PDRB mengalami peningkatan tiap tahunnya sehingga PDRB mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

4.3.4 Pengaruh Jumlah Penduduk, Inflasi dan PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan tabel IV.8 secara simultan diperoleh nilai F hitung sebesar 39,198 dengan signifikansi 0,000. Jumlah Penduduk, Inflasi dan PDRB berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah, karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Dengan nilai signifikansi 0,000 hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada jumlah penduduk, inflasi dan PDRB akan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian menunjukkan regresi sebesar 39,198, hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk, inflasi dan PDRB memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Pengaruh positif mengindikasikan bahwa apabila jumlah penduduk, inflasi dan PDRB mengalami kenaikan secara simultan maka penerimaan pajak daerah akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.

Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, Jumlah Penduduk, Inflasi dan PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah”, dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Shiska, dkk (2013) jumlah penduduk, inflasi dan PDRB berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah.

BAB V. Penutup

5.1. Kesimpulan

Pajak Daerah merupakan pungutan wajib yang dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah dan kepentingan umum. Pajak daerah memiliki kontribusi terhadap penerimaan dalam mengatasi masalah pembiayaan pengelolaan dan pembangunan daerah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban dalam membayar pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini berarti jumlah penduduk mengalami peningkatan namun tidak mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu prasetyo (2016) menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan hal ini Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini berarti ketika harga barang naik atau turun, tidak mengurangi kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Artha, dkk (2015) yang menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Dengan ditunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini berarti PDRB mengalami kenaikan maka angka penerimaan pajak daerah juga mengalami kenaikan. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya menurut Helti

(2013) menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil data di atas dan kesimpulan yang telah dibuat, maka saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah Kota Makassar sangat diharapkan dapat lebih mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah atau pembangunan perekonomian di Kota Makassar sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah atau menambah penghasilan daerah.
2. PDRB sebagai salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah seharusnya dapat ditingkatkan atau dipertahankan. Dengan meningkatnya PDRB maka semakin tinggi pula tingkat ekonomi daerah sehingga masyarakat akan lebih tertib untuk membayar pajak.
3. Secara umum, hasil uraian di bab-bab sebelumnya masih kurang, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah variabel-variabel yang berpotensi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah sehingga dapat diupayakan penerimaan pajak daerah yang terus naik dengan menggunakan metode dan analisa data yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- [1] R. Indonesia, *Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah*, 2004.
- [2] R. Indonesia, *Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, 1999.
- [3] N. F. Haniz dan H. Sasana, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal," 2013.
- [4] P. S. Arianto dan Y. Y. Padmono, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Surabaya," 2014.
- [5] Y. D. Artha, Badjuri dan Zainuri, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember," 2016.
- [6] M. F. Asmuruf, V. A. Rumat dan G. M. Kawung, "Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong," 2015.
- [7] S. I. Prasetyo, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi, dan PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2011-2014)," 2016.
- [8] bitar, "6 Pengertian Asuransi Menurut Para Ahli Terlengkap," 22 06 2016. [Online]. Available: www.gurupendidikan.co.id/6-pengertian-asuransi-menurut-para-ahli-terlengkap/. [Diakses 24 02 2018].

- [9] Luqman, "Teori dan Asas Pemungutan Pajak," 4 April 2016. [Online]. Available: <http://www.kringpajak.com/teori-dan-asas-pemungutan-pajak/>. [Diakses 6 Maret 2018].
- [10] Dudung, "Pengertian Pajak Menurut Para Ahli Lengkap Dengan Unsur serta Jenisnya," 11 12 2015. [Online]. Available: <http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-unsur-serta-jenisnya/>. [Diakses 07 03 2018].
- [11] R. Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 2009.
- [12] P. R. Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*, 2016.
- [13] B. P. S. K. Makassar, *Kota Makassar Dalam Angka Makassar Municipality in figures 2014*, Kota Makassar: Katalogic, 2014.
- [14] I. Putong, *Economics Pengantar Mikro dan Makro*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- [15] I. Susanto, "Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli DAerah (PAD)," 2014.
- [16] H. Y. Dama, A. L. C. Lopian dan J. I. Sumual, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado (Tahun 2005-2014)," vol. 16, 2016.
- [17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 2010.
- [18] Sugiyono, *Metode Peneltian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 2015.

Lampiran
